

NEGARA PANCASILA SEBAGAI *DAR AL-'AHD* WA *AL-SYAHADAH* MUHAMMADIYAH: RESPON TERHADAP ISLAMISME

Adlan Ryan Habibie

Institut Agama Islam Negeri Manado

Email: adlan.ryan@iain-manado.ac.id

Abstrack: *This article aims to see how the decision of the Pancasila state as Dar al-'Ahd wa as-Shahadah was Muhammadiyah's response to the ideology of political Islam or Islamism. The approach used in this article is a qualitative approach using philosophical analysis. The primary Data of this study were taken from the manuscript of the state of Pancasila as Dar Al-'Ahd wa al-Shahadah published by the Central Board of Muhammadiyah. The results showed that the state of Pancasila as Dar Al - ' Ahd wa Al-Shahadah decided by Muhammadiyah at the 47th Congress in 2015 in Makassar showed that the state of Pancasila is the result of national consensus and a proving ground to be a safe and peaceful country. For Muhammadiyah in the text of the Pancasila state decision as Dar al - ' Ahd wa as-Shahadah, Pancasila as the basis of the state also contained Islamic and Indonesian values at the same time.*

Key Words: *Pancasila State, Dar al-'Ahd wa as-Syahadah, Islamism.*

Abstrak: *Artikel ini bertujuan untuk melihat gagasan Negara Pancasila sebagai Dar al-'Ahd wa as-Syahadah sebagai respon Muhammadiyah terhadap ideologi Islam politik atau Islamisme. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan kajian kepustakaan dengan pendekatan analisis tematik terhadap dokumen Keputusan Muhammadiyah tentang Negara Pancasila sebagai Dar al-'Ahd wa as-Syahadah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Negara Pancasila sebagai Dar Al-'Ahd wa Al-Syahadah yang digagas Muhammadiyah mengandung pengertian bahwa Negara Pancasila sudah merupakan rumusan final sebagai kesepakatan bersama di atas Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lewat gagasan ini Muhammadiyah juga dengan tegas menolak ideologi islamisme yang bertujuan mengubah dasar negara.*

Kata kunci: *Negara Pancasila sebagai Dar al-'Ahd wa as-Syahadah, Islamisme.*

Pendahuluan

Secara geografis, Indonesia terdiri dari 13.667 pulau baik yang berpenghuni maupun tidak. Secara etnik, Indonesia memiliki 358 suku bangsa dan 200 sub suku bangsa. Sementara jika dilihat dari jumlah penduduk Indonesia yang berkisar 236 juta jiwa, jumlah pemeluk agamanya dapat dibagi dalam persentase yakni Islam 86,88%, Kristen 7,49%, Katolik 3,09%, Hindu 1, 71%, Budha 0,75% dan Konghuchu 0,03%.¹ Dengan kata lain, umat Islam adalah mayoritas di negeri ini. Keragaman di atas merupakan realitas. Tetapi pada fakta di lapangan, keragaman Indonesia kerap

¹ <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/09/30/sebanyak-8688-penduduk-indonesia-beragama-islam>. Diakses pada tanggal 20 Mei 2023.

AQLAM: Jorunal of Islam and Plurality

(P-ISSN 2528-0333; E-ISSN: 2528-0341)

Website: <http://journal.iain-manado.ac.id/index.php/AJIP/index>

Vol. 8, No. 1 2023

berhadapan dengan tantangan yang kompleks. Salah satu tantangan tersebut adalah dengan kemunculan kelompok Islamisme² di panggung sosial-politik Indonesia.

Islamisme menurut Oliver Roy merupakan paham atau gerakan Islam yang memandang bahwa Islam adalah istilah yang sering dihubungkan dengan sistem pemikiran atau ideologi yang memahami Islam tidak hanya sebagai ritual keagamaan semata, tapi juga sebagai upaya menjadikan Islam sebagai dasar ideologi sebuah politik (*al-din wa ad-daulah*).³ Dalam perkara Islamisme, politik yang dibungkus dengan narasi agama atau agamaisasi politik adalah upaya mempromosikan suatu tatanan politik yang dipercaya beremanasi dari kehendak Tuhan (kedaulatan Tuhan) dan bukan berdasarkan kedaulatan rakyat.⁴

Dari definisi yang diajukan oleh Oliver Roy dan Bassam Tibi di atas, jelas bahwa haluan politik dari kelompok Islamisme berbeda dengan kelompok-kelompok gerakan Islam arus utama di Indonesia, seperti Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU). Perbedaannya bukan hanya pada corak aktivisme⁵ politiknya, namun juga pada persoalan yang paling mendasar terkait konsep dasar negara. Sejak awal, NU dan Muhammadiyah telah dianggap sebagai gerakan *civil society* yang telah turut membidani kelahiran bangsa Indonesia. Bahkan tokoh-tokoh dari kedua ormas ini memainkan peran sentral pada awal-awal persiapan kemerdekaan Indonesia. Meskipun pada satu sisi, perkembangan Islam di Indonesia bisa dikatakan cukup matang dengan dinamika pemikiran dan gerakan sosial yang dilakukan oleh organisasi Islam di atas, namun fenomena bangkitnya gerakan Islamisme menjadi persoalan pada sisi yang lain. Tidak bisa dipungkiri, infiltrasi dari ideologi Islamisme telah menusuk juga ke jantung pertahanan ormas-ormas Islam yang lahir dari rahim bangsa Indonesia ini. Pada kasus Muhammadiyah sendiri misalnya, dalam beberapa laporan rentan terinveksi virus Islamisme.⁶

² Asef Bayat menggunakan istilah Islamisme dengan merujuk pada wacana dan pretektek-praktek di luar kelaziman (*extra ordinary*), yang bertujuan baik secara kolektif maupun individual untuk mendorong perubahan sistem sosial dan politik yang sudah ada. Lihat Noorhaidi Hasan, *Islam Politik Di Dunia Kontemporer: Konsep, Genealogi, Dan Teori*, (Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2012), hal. 9.

³ Oliver Roy, *The Failure of Political Islam*, (London: I.B. Tauris Publishers, 1994), hal. ix.

⁴ Bassam Tibi, *Islam dan Islamisme*, terj. Alfathri Adlin, (Bandung: Mizan, 2016), hal. 1.

⁵ Aktivisme salah satu unsur terpenting dalam melihat Islamisme. Artinya, selain ideologi, gejala Islamisme tidak terjadi sebelum kelompok ini mengaktifkan diri melakukan aktivitas tertentu yang condong bernuansa politik dengan spektrum yang luas, terutama terkait pemerintahan. Noorhadi Hasan, *Islam Politik*, 3.

⁶ Saat pelaksanaan Muktamar Muhammadiyah pada bulan Juli 2005, kelompok Islamisme, dalam hal ini Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) mendominasi banyak forum. Kampanye “anti liberalism dan pluralisme” yang diusung kelompok ini sangat efektif dan berhasil “menyingkirkan” tokoh-tokoh progresif Muhammadiyah dalam kepemimpinan PP Muhammadiyah. Infiltrasi kelompok islamisme ke dalam Muhammadiyah saat itu cukup kuat. Lihat Abdurrahman Wahid “Musuh Dalam Selimut” dalam Pengantar Editor, *Ilusi Negara Islam*, (Jakarta: The Wahid Institute, 2009), hal. 23. Infiltrasi kelompok Islamisme dalam Muhammadiyah juga bisa dilihat dalam tulisan Din Wahid, “Muhammadiyah Di Tengah Arus Gerakan Islam Transnasional”, dalam *Islam Berkemajuan Untuk Peradaban Dunia: Refleksi dan Agenda Muhammadiyah ke Depan*. ed. Alpha Amirrachman, Andar Nubowo, Azaki Khoiruddin, (Bandung: Mizan, 2015).

AQLAM: Jorunal of Islam and Plurality

(P-ISSN 2528-0333; E-ISSN: 2528-0341)

Website: <http://journal.iain-manado.ac.id/index.php/AJIP/index>

Vol. 8, No. 1 2023

Sebagai ormas Islam yang lahir dari rahim Indonesia, Muhammadiyah menegaskan diri sebagai gerakan dakwah dan pembaruan (*tajdid*). Dakwah Muhammadiyah mengajak kepada pemurnian ajaran Islam dari tradisi dan kepercayaan yang dianggap membahayakan kemurnian akidah. Sementara dengan *tajdidnya*, Muhammadiyah berusaha mengkontekstualisasikan ajaran Islam dengan tuntutan perkembangan zaman (modernitas), sehingga jargon Islam sebagai “*shalih li kulli zaman wa makan*” (selaras untuk setiap waktu dan tempat) dapat diaplikasikan. Dakwah Muhammadiyah tidak saja membatasi diri pada model dakwah *bi al-lisan*, tetapi juga turut memberdayakan umat dengan amal usaha nyata di pelbagai bidang, baik pendidikan, kesehatan, dan santunan sosial. Amal usaha inilah yang menjadi ciri khas dari Muhammadiyah.⁷

Sementara itu di sisi yang lain, *tajdid* bagi Muhammadiyah termanifestasi dalam gagasan agama yang berkemajuan (*din al-hadharah*). Gerakan *tajdid* ini mempunyai dua sisi makna, yakni purifikasi dan modernisasi. Jika yang pertama dimaknai sebagai pemeliharaan ajaran Islam sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah, sementara yang kedua adalah penafsiran, penerapan, dan manifestasi ajaran Islam atas dasar Al-Qur'an dan Sunnah.⁸ Di dalam ranah modernisasi ini terkandung nilai pentingnya *ijtihad*. *Ijtihad* yang dimaksud merupakan upaya untuk mengkontekstualisasikan ajaran Islam sesuai dengan perkembangan zaman.

Sejak awal berdiri, Muhammadiyah telah berkiprah melewati berbagai fase zaman yang sarat dengan dinamika yang cukup menguras tenaga. Dalam kehidupan kebangsaan, khususnya pada era reformasi, rumusan Pernyataan Pikiran Muhammadiyah Abad Kedua menyebut bahwa Muhammadiyah menjadi pilar penting masyarakat madani (*civil society*) dan memelopori era baru Indonesia yang demokratis, menghargai hak asasi manusia, berwawasan kemajemukan, serta bersikap responsif dan kritis kepada pemerintah sesuai dengan kepribadian Muhammadiyah. Pandangan kebangsaan Muhammadiyah tersebut menegaskan komitmen tentang Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 serta konsisten dalam mengintegrasikan ke-Islam-an dan ke-Indonesia-an.

Komitmen kebangsaan Muhammadiyah tersebut lebih lanjut ditegaskan dalam gagasan Negara Pancasila sebagai *Dar Al-'Ahdi wa Al-Syadah* yang secara organisasi ditetapkan lewat Muktamar Muhammadiyah ke-47 tahun 2015 di Makassar. Secara harfiah, rumusan ini bermakna Negara Pancasila berdasarkan kesepakatan dan kesaksian (pembuktian). Muhammadiyah berpandangan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang diproklamasikan pada 17 Agustus 1945 adalah negara Pancasila yang ditegaskan di atas falsafah kebangsaan yang luhur dan sejalan dengan nilai-nilai Islam.⁹ Muhammadiyah berpandangan Pancasila adalah hasil rumusan yang Islami. Dalam Pancasila terkandung ciri keislaman dan keindonesiaan yang memadukan nilai-nilai ketuhanan dan kemanusiaan, hubungan individu dan masyarakat, kerakyatan dan permusyawaratan, serta keadilan dan

⁷ Din Wahid, “Muhammadiyah Di Tengah Arus Gerakan Islam Transnasional”, hal. 88.

⁸ Fathurrahman Djamil, *Metode Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah*, Jakarta: (Logos, 1995), hal. 58.

⁹ *Berita Resmi Muhammadiyah, Tanfidz Keputusan Muktamar Muhammadiyah ke-47 Makassar*, (Yogyakarta: Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 2015), hal. 67.

kemakmuran. Melalui proses integrasi inilah, umat Islam diharapkan mampu menjadi kekuatan yang dapat diteladani secara kualitas.¹⁰

Negara Pancasila sebagai *Dar Al-'Ahdi* (sebuah kesepakatan) adalah sebuah konsep yang mengakui bahwa eksistensi Negara Republik Indonesia dengan dasar negara Pancasila merupakan kesepakatan seluruh elemen bangsa, bahasa, dan latar belakang agama. Karena Pancasila merupakan kesepakatan seluruh elemen bangsa, Muhammadiyah berpandangan Pancasila merupakan bentuk final sebagai ideologi negara yang tidak perlu lagi dipersoalkan atau bahkan diganti dengan ideologi lainnya. Bahkan dalam konsep tersebut Muhammadiyah dengan tegas menyatakan bahwa segala upaya yang ingin mengubah bentuk negara Pancasila adalah bertentangan dengan komitmen nasional dan cita-cita Proklamasi Kemerdekaan.¹¹ Sementara dalam pemaknaannya sebagai *Dar Al-Syahadah* (kesaksian atau pembuktian), Muhammadiyah mengajak seluruh komponen bangsa, terlebih umat Islam untuk membuktikan diri dalam mengisi dan membangun kehidupan kebangsaan. Muhammadiyah mendorong adanya persaingan yang sehat dalam mengisi dan memajukan kehidupan bangsa dengan segenap kreasi dan inovasi terbaik yang dimiliki masing-masing pihak. Persaingan yang sehat dimaknai sebagai prinsip *fastabiq al-khairat* sebagaimana jargon yang hidup di kalangan Muhammadiyah.

Menurut Abdul Mu'thi, lahirnya gagasan Muhammadiyah tentang Negara Pancasila sebagai *Dar Al-'Ahdi* wa *Al-Syahadah*, berangkat dari tiga latar belakang utama. *Pertama*, adanya kelompok-kelompok atau beberapa elemen masyarakat, terutama masyarakat muslim yang masih mempersoalkan relasi antara Islam dan negara, dan mempersoalkan negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila. *Kedua*, adanya realitas bahwa sebagai bangsa, secara ideologis belum merumuskan secara eksplisit dan membuat satu penjelasan akademik mengenai konsep Negara Pancasila. *Ketiga*, ada sebuah pandangan yang berkembang, di mana masyarakat Islam dianggap sebagai ancaman terhadap negara Pancasila itu sendiri.¹² Senada dengan apa yang disampaikan oleh Abdul Mu'thi, Din Syamsuddin juga menitikebratkan pada fakta bangsa Indonesia sendiri yang majemuk, maka negara Pancasila merupakan bentuk ideal bagi bangsa Indonesia.¹³ Karena itu gagasan Negara Pancasila sebagai *Dar al-'Ahdi* wa *as-Syahadah* bertujuan sebagai rujukan dan orientasi pemikiran dan tindakan seluruh anggota Muhammadiyah dalam berbangsa dan bernegara.¹⁴

Islam Indonesia

Sebagai agama mayoritas di negeri ini, Islam di Indonesia terbilang cukup unik serta mendapat apresiasi luas dari para pengamat karena dianggap mempunyai karakter yang berbeda dengan Islam di belahan dunia lain, terlebih di jazirah Arab, di

¹⁰ *Berita Resmi Muhammadiyah*, hal 67.

¹¹ *Berita Resmi Muhammadiyah*, hal. 69.

¹² Dikdik Baehaqi dan Syifa Siti Aulia, "Studi Tentang Negara Pancasila sebagai Darul Ahdi wa Syahadah Untuk Penguatan Materi Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di Universitas Ahmad Dahlan", *Jurnal Civics*, vol. 14, No. 2, Oktober 2017, hal. 208.

¹³ Saefudin Zuhri, *Deradikalisasi Terorisme: Menimbang Perlawanan Muhammadiyah dan Loyalitas Nahdlatul Ulama*, (Jakarta: Daulat Press, 2017), hal. 78.

¹⁴ Saefudin Zuhri, *Deradikalisasi Terorisme*, hal. 78.

AQLAM: Jorunal of Islam and Plurality

(P-ISSN 2528-0333; E-ISSN: 2528-0341)

Website: <http://journal.iain-manado.ac.id/index.php/AJIP/index>

Vol. 8, No. 1 2023

mana agama ini lahir. Salah satu ciri karakteristik wajah Islam di Indonesia adalah pertautannya dengan lokalitas atau tradisi setempat. Penampilan Islam Indonesia yang penuh dengan “warna tradisi” tersebut, dalam batas-batas tertentu merupakan hasil pemahaman dan penafsiran terhadap substansi Islam yang ditransformasikan secara aplikatif dalam konteks budaya Indonesia.¹⁵ Keberhasilan mentransformasikan ajaran Islam ke dalam konteks budaya Indonesia inilah yang menjadikan Islam Indonesia menjadi kaya akan pemahaman, pemaknaan, penafsiran, juga dari segi tampilan.¹⁶

Peranan umat Islam dalam sejarah Indonesia menemukan bentuknya yang modern dan terorganisir pada awal abad ke-20 yang ditandai dengan lahirnya gerakan kebangkitan nasional dari organisasi-organisasi Islam seperti Jami'at Khair (1905), Sarikat Islam (1911), Muhammadiyah (1912), Al-Irsyad (1914), Persatuan Islam (1923), Nahdlatul Ulama (1926), dan lain-lain. Arus pergerakan nasional dari umat Islam tersebut bersatu dengan komponen kebangkitan nasional lainnya menjadi sumber kekuatan dan modal perjuangan bangsa yang melahirkan kemerdekaan Indonesia. Persatuan yang berangkat dari latar belakang pemikiran keislaman ini menjadi modal sosial dalam kehidupan kebangsaan.

Apresiasi terhadap Islam Indonesia tidak hanya pada keragaman tampilannya saja, lebih dari itu, Islam Indonesia dinilai mampu beradaptasi dengan kemodernan, termasuk isu-isu terkait demokrasi dan hak asasi manusia.¹⁷ Karakteristik inklusif inilah yang memberikan kemungkinan masyarakat Indonesia, khususnya umat Islam, mampu bersikap demokratis. Sikap demokratis ini sendiri diakui oleh para pemikir Islam seperti Fazlur Rahman dan Mohammed Arkoun. Rahman bahkan menegaskan:

“bangsa Indonesia adalah bangsa yang berwatak demokratis. Karena itu hanya penafsiran Islam yang betul-betul demokratislah yang akan berhasil di sana.”¹⁸

Sikap demokratis ini juga yang berhasil menampilkan wajah Islam Indonesia yang ramah dengan pelbagai perbedaannya. Faktor ini tidak lepas dari catatan sejarah yang menyebutkan bahwa Islam mengalami sukses besar dalam melakukan misi dakwahnya di Nusantara dalam rentang waktu yang tidak terlalu lama. Kesuksesan ini diakui lagi karena Islam masuk dan berkembang di wilayah Nusantara tanpa ada unsur paksaan apalagi kekerasan.

Pada perkembangannya, corak Islam Indonesia yang inklusif dan demokratis dengan ragam pemikiran dapat dilihat pengejawentahannya pada organisasi-organisasi Islam yang tumbuh di Indonesia. Sebut saja NU dan Muhammadiyah, tanpa menafikkan peran besar organisasi Islam lainnya. Dua ormas besar ini pada perkembangannya tak pernah berhenti menyuarakan model Islam yang *washatiyyah* (moderat), toleran, dan memiliki komitmen kebangsaan yang kuat. Bahkan dalam

¹⁵ Mujamil Qomar, *Fajar Baru Islam Indonesia? Kajian Komprehensif atas Sejarah dan Dinamika Intelektual Islam Nusantara*, (Bandung: Mizan, 2012), 22.

¹⁶ Mujamil Qomar, *Fajar Baru*, 23.

¹⁷ Amin Mudzakkir, “Islamisme di Indonesia”, dalam *TITIK-TEMU: Jurnal Dialog Peradaban*, vol. 8, no. 2, Januari-Juni 2016, 100.

¹⁸ Fazlur Rahman, *Islam dan Modernitas: Tentang Transformasi Intelektual*, terj. Ahsin Mohammad, (Bandung: Pustaka, 2005), 153.

AQLAM: Jorunal of Islam and Plurality

(P-ISSN 2528-0333; E-ISSN: 2528-0341)

Website: <http://journal.iain-manado.ac.id/index.php/AJIP/index>

Vol. 8, No. 1 2023

pandangan Syafii Maarif, sudah menjadi semacam aksioma di kalangan umat Islam, selama NU-Muhammadiyah bergandengan tangan, maka bangsa ini tetap merasa aman dari anacam radikalisme ekstrem.¹⁹ Wajah Islam Indonesia dengan karakter yang moderat dan demokratis sebagaimana yang ditunjukkan ormas-ormas Islam di Indonesia ini telah banyak dikemukakan beberapa peneliti.²⁰

Namun apresiasi yang muncul terhadap wajah Islam di Indonesia paling tidak sedikit mengalami pergeseran, terlebih ketika rezim Orde Baru berhasil diturunkan. Adanya pergeseran wajah Islam Indonesia lebih disebabkan oleh gejalanya bangkitnya gerakan Islamisme. Menurut Khamami Zada, sikap dari gerakan Islam tersebut secara internal memperjuangkan syariat Islam menjadi dasar dan hukum negara, dan secara eksternal, bersikap anti Barat (dalam hal ini Amerika dan sekutunya) lewat aksi-aksi protes dan unjuk rasa.²¹ Kemunculan Front Pembela Islam (FPI), Majelis Mujahidin Indonesia (MMI), dan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) bisa dianggap mewakili suara dan agenda-agenda politik dari kalangan Islamisme. Meskipun dalam aksi-aksinya di lapangan, gerakan-gerakan tersebut memiliki pendekatan yang berbeda, tapi pada dasarnya tujuan mereka satu: penerapan syariat Islam di Indonesia. FPI misalnya, lebih menekankan pada aksi-aksi jalanan menggelar sweeping siang hari di bulan Ramadan, serta merazia tempat-tempat hiburan malam sebagai implementasi dari amar ma'ruf nahi munkar, sementara HTI lebih mengutamakan kaderisasi dan sosialisasi terkait ide utamanya mengembalikan khilafah Islamiyyah yang dipandang sebagai satu-satunya sistem politik yang sah untuk menerapkan syariat Islam.²²

Sejak berlakunya era reformasi, Islam di Indonesia condong diperhadapkan dengan situasi yang sebenarnya bukan lagi menjadi isu baru, seperti formalisasi syariat, Islam sebagai dasar negara, sampai penegakan kembali khilafah. Hanya saja wacana yang diusung oleh kelompok Islamisme ini seolah mendapat angin segar sejak dibukanya “keran” demokrasi, sehingga kelompok-kelompok tersebut dapat bertindak lebih jauh dalam mengagitasi agenda-agenda mereka ke ruang publik, bahkan tak segan dengan menggunakan cara-cara radikal dan tidak demokratis. Faktor inilah menjadi alasan utama bagi kelompok Islam arus utama seperti Muhammadiyah merasa perlu menegaskan posisi kebangsaannya.

¹⁹ Ahmad Syafii Maarif, *Islam Dalam Bingkai Keindonesiaan dan Kemanusiaan: Sebuah Refleksi Sejarah*, (Bandung: Mizan, 2009), hal. 36.

²⁰ Lihat penelitian Robert W. Hefner, *Civil Islam: Islam dan Demokrasi di Indonesia*, Jakarta: ISAI, 2001, Masykuri Abdillah, *Demokrasi di Persimpangan Jalan: Respons Intelektual Muslim Indonesia Terhadap Konsep Demokrasi 1966-1993*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1999), Syafii Anwar, *Pemikiran dan Aksi Islam di Indonesia, Sebuah Kajian Politik Tentang Cendekiawan Muslim Orde Baru*, (Jakarta: Paramadina, 1995), serta Bahtiar Effendy, *Islam dan Negara: Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik di Indonesia*, (Jakarta: Paramadina, 1999).

²¹ Khamami Zada, “Politik Islam Radikal: Survey Wacana dan Gerakan Islam di Indonesia, dalam Islam, Radikalisme, dan Demokratisasi, *Jurnal Demokrasi dan HAM*, vol. 3, no. 1, Januari-April 2003, hal. 35.

²² Din Wahid, “Muhammadiyah Di Tengah Arus”, hal. 90.

Islamisme di Indonesia

Di antara tema-tema reformasi dan perubahan dalam wacana Islam kontemporer, perubahan politik mengambil posisi penting. Hal ini karena isu tersebut secara langsung berkaitan dengan tata kehidupan muslim dan menyentuh doktrin Islam, yakni penyatuan agama dan negara, serta supremasi agama atas negara. Walaupun bisa diperdebatkan, banyak muslim yang percaya bahwa pemisahan agama dan negara adalah sesuatu yang “asing” dalam Islam.²³

Istilah Islamisme menurut Amin Mudzakkir pertama kali dikemukakan oleh seorang filsuf Perancis, Voltaire, sebagai pengganti kata “*mahometisme*” di mana istilah ini dipakai sebagai sebutan untuk “agama orang Arab” di kalangan Eropa.²⁴ Tapi secara umum istilah itu mengacu pada jenis tertentu dari interpretasi agama, organisasi dan gerakan di kalangan umat Islam yang menekankan keunggulan Islam vis-à-vis ideologi politik lainnya.²⁵ Islamisme melandaskan pandangannya pada persoalan teokratis yang dalam pengertian utamanya bahwa tidak ada kedaulatan selain kedaulatan Tuhan. Alasan inilah yang membuat para kelompok Islamis menolak sistem politik selain yang berasal dari agama menurut tafsiran mereka.

Dalam sejarah Indonesia, Islamisme dialamatkan kepada gerakan Darul Islam/Negara Islam Indonesia (DI/NII) dan Masyumi (Majelis Syuro Muslimin Indonesia). Dua gerakan ini secara eksplisit menyebut pendirian negara Islam sebagai salah satu agendanya, meskipun dalam cara bagaimana agenda itu diwujudkan, kedua kelompok ini memilih jalur perjuangan yang berbeda. DI/NII memilih jalur lewat aksi pemberontakan, sementara Masyumi memilih jalur yang lebih demokratis dengan menjadi peserta Pemilu. Dua organisasi ini oleh Martin van Bruinessen, sebagaimana dikutip Amin, adalah bapak moyang organisasi-organisasi radikal di Indonesia pasca Orde Baru.²⁶

Pada masa Orde Baru, kelompok Islamisme mengalami kendala dari sisi gerakan. Ini disebabkan karena kebijakan politik Soeharto yang tidak menginginkan kelompok ini berkembang sebagaimana juga kekuatan kiri yang ditumpas pasca peristiwa 1965. Sejak itu, praktis dalam kegiatan politiknya Islamisme, mengalami kendala, kalau bukan terhenti. Akan tetapi, pada masa itu beberapa eks Masyumi yang masih menyimpan utopia tegaknya negara Islam berhasil mendirikan DDII (Dewan Dakwah Islam Indonesia)²⁷ dengan tokoh utamanya M. Natsir yang memiliki jaringan yang kuat dengan Timur Tengah dalam hal ini Arab Saudi. Lewat DDII ini jugalah pengaruh Islamisme dari Timur Tengah menyebar di Indonesia.

Tumbangya rezim Orde Baru membuat kalangan Islamis ini menemukan momentumnya untuk melakukan akselerasi politiknya baik secara kultural lewat ormas maupun secara struktural lewat partai. Tercatat ada beberapa ormas dan partai di Indonesia yang memiliki ideologi Islamisme yang sampai hari ini masih tetap eksis

²³ Luthfi Assyaukanie, *Ideologi Islam dan Utopia: Tiga Model Negara Demokrasi di Indonesia*, (Jakarta: Paramadina, 2011), hal. 38.

²⁴ Amin Mudzakkir, *Islamisme di Indonesia*, 100.

²⁵ Amin Mudzakir, *Islamisme di Indonesia*, 100.

²⁶ Amin Mudzakir, *Islamisme di Indonesia*, 103.

²⁷ Luthfi Assyaukanie, *Islam an the Secular State in Indonesia*, (Singapore: ISEAS, 2009), hal. 57.

dan secara terang-terangan mengkampanyekan agenda politik mereka, seperti FPI, HTI, maupun PKS.

Gagasan Negara Pancasila sebagai *Dar Al-‘Ahdi wa Al-Syahadah*

Dalam dokumen resmi tentang Keputusan Muktamar Muhammadiyah ke-47 yang memuat tentang Gagasan Negara Pancasila *Dar Al-‘Ahdi wa Al-Syahadah* tercantum bahwa:

“Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang diproklamasikan 17 Agustus 1945 adalah negara Pancasila yang ditegakkan di atas falsafah kebangsaan yang luhur dan sejalan dengan ajaran Islam.”²⁸

Bagi Muhammadiyah negara Pancasila yang mengandung jiwa, pikiran, dan cita-cita luhur sebagaimana termaktub dalam pembukaan UUD 1945 dapat diaktualisasikan sebagai “Baladun Thayyibatun wa Rabbun Ghafur”. Maksud dari pandangan ini adalah Negara Pancasila sebagai *Dar Al-‘Ahdi wa Al-Syahadah* adalah negara yang dibangun dari hasil konsensus nasional (*Dar Al-‘Ahdi*) dan tempat pembuktian atau kesaksian (*Al-Syahadah*) untuk menjadi negeri yang aman, dan damai (*Dar Al-Salam*) menuju kehidupan yang adil, makmur, bermartabat, dan berdaulat dalam naungan ridha Tuhan.²⁹

Din Syamsuddin menjelaskan bahwa Negara Perjanjian atau Dar Al-Ahdi memiliki pemaknaan di mana negara Pancasila sebagai bentuk final dan ideal bagi bangsa Indonesia yang mejemuk. Pandangan ini tentunya sangat tepat karena mengingat Indonesia sebagai negara yang sangat majemuk dan plural dalam pelbagai perbedaan. Sedangkan menurut Din, *Dar Al-Syahadah* adalah sebuah aktualisasi dari kesepakatan yang tersebut. Komitmen di sini memiliki pengertian bahwa warga negara atau kelompok negara berlomba-lomba memberikan kesaksian juga pembuktian kepada warga dunia tentang kerja dan kinerja mereka dalam merealisasi cita-cita bersama membangun negara. NKRI sebagai negara kesaksian merupakan kawasan pembuktian dari kesepakatan tersebut.³⁰

Dalam pandangan resminya, Muhammadiyah memandang Pancasila sebagai dasar negara yang mengikat seluruh rakyat dan komponen bangsa. Pancasila bukan agama, tetapi substansinya mengandung dan sejalan dengan nilai-nilai ajaran agama (Islam). Muhammadiyah berkeyakinan bahwa dalam Pancasila terkandung ciri keislaman dan keindonesiaan yang memadukan nilai-nilai ketuhanan dan kemanusiaan. Melalui proses integrasi keislaman dan keindonesiaan yang posistif itu, Muhammadiyah berharap umat Islam Indonesia bisa tampil sebagai kekuatan

²⁸ *Berita Resmi Muhammadiyah*, hal. 67.

²⁹ *Berita Resmi Muhammadiyah*, hal. 67.

³⁰ Din Syamsuddin, “NKRI: Negara Perjanjian dan Kesaksian”, dalam *Islam Nusantara: Dari Ushul Fiqh Hingga Paham Kebangsaan*, ed. Akhmad Sahal dan Munawir Aziz, (Bandung: Mizan Pustaka, 2015), hal. 2-26.

mayoritas yang dapat menjadi teladan yang baik dalam mewujudkan cita-cita nasional yang sejalan dengan idealisasi negara sebagai negeri yang baik.³¹

Muhammadiyah memandang bahwa pembentukan negara Indonesia bertumpu pada dua konsensus bangsa, yaitu cita-cita bangsa dan ideologi negara. Keduanya termaktub jelas dalam Pembukaan UUD 1945. Konsensus pertama dirumuskan sebagai trilogi cita-cita nasional; Pertama, negara Indonesia yang merdeka, bersatu, adil, dan makmur. Kedua, perikehidupan kebangsaan yang bebas. Ketiga, melindungi segenap bangsa dan seluruh tanah air Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sedangkan untuk konsensus kedua terumuskan dalam lima butir falsafah dan ideologi negara yaitu Pancasila yang memadukan nilai-nilai ketuhanan dan kemanusiaan (humanisme religius) yang mengejawantahkan hubungan antar rakyat yang bersatu dalam orientasi permusyawaratan untuk keadilan dan kemakmuran.³²

Bagi Muhammadiyah, dalam negara Pancasila terkandung paham nasionalisme yang menjunjung tinggi nilai-nilai dan orientasi kebangsaan yang menjadi bingkai pandangan negara-bangsa. Nasionalisme yang bertumpu pada jiwa dan cita-cita kemerdekaan, bagi Muhammadiyah, harus mampu menghilangkan benih-benih separatisme dan penyimpangan dalam bernegara. Karena itu Muhammadiyah memandang segala bentuk separatisme yang ingin memisahkan diri dari Indonesia dan mencita-citakan bentuk negara lain adalah bertentangan dengan komitmen nasional dan cita-cita kebangsaan.³³ Tapi tidak cukup sampai di situ, Muhammadiyah memandang bahwa cita-cita dan spirit nasionalisme tidak akan mungkin terwujud dan dikhianti jika bentuk penyelewengan dalam mengurus negara tidak juga bisa diselesaikan. Muhammadiyah menyadari korupsi, nepotisme, pelanggaran hak asasi manusia, serta penyakit elit lainnya masih menjadi problem dalam kehidupan bernegara hari ini. Oleh karena itu, Muhammadiyah mendorong Pancasila dengan lima silanya perlu ditransformasikan ke dalam seluruh sistem kehidupan nasional. Pancasila harus diberi pemaknaan nilai dan aktualisasi secara terbuka dan dinamis sehingga dapat menjadi rujukan dan panduan yang mencerdaskan, memajukan, dan mencerahkan kehidupan berbangsa dan bernegara.³⁴

Gagasan Negara Pancasila sebagai *Dar Al-'Ahdi wa Al-Syahadah* ini tidak bisa dipisahkan dengan pandangan Islam Berkemajuan yang diusung oleh Muhammadiyah. Keduanya ibarat dua sisi pada satu logam. Negara Pancasila sebagai *Dar Al-'Ahdi wa Al-Syahadah* hanya dapat terwujud jika gagasan Islam Berkemajuan menjadi pijakan dalam bernegara. Karena pada dasarnya dalam kehidupan kebangsaan maupun kemanusiaan universal, Muhammadiyah bertolak dari pandangan Islam Berkemajuan.³⁵ Hal ini menegaskan komitmen Muhammadiyah untuk terus

³¹ Lihat "Negara Pancasila sebagai Dar Al-'Ahdi wa Al-Syahadah", dalam *Berita Resmi Muhammadiyah no. 1 2015-2020, Tanfidz Keputusan Muktamar Muhammadiyah Ke-47 Makassar*, (Yogyakarta: Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 2015), hal. 68.

³² Saefudin Zuhri, *Deradikalisasi Terorisme*, hal. 79.

³³ *Berita Resmi Muhammadiyah*, hal. 69.

³⁴ *Berita Resmi Muhammadiyah*, hal. 69.

³⁵ *Berita Resmi Muhammadiyah*, hal. 69.

berkiprah menyemaikan spirit kebenaran, kebaikan, kedamaian, keadilan, dan keutamaan hidup secara dinamis menuju peradaban utama.

Pada dasarnya spirit Islam Berkemajuan bisa dilacak pada awal-awal didirikannya Muhammadiyah, sebagaimana yang diungkapkan oleh KH. Ahmad Dahlan sebagai pendirinya. Istilah tersebut kemudian secara formal dijadikan substansi tentang pandangan keislaman yang terkandung dalam Pernyataan Pikiran Muhammadiyah Abad Kedua.³⁶ Menurut Haedar Nashir, Islam Berkemajuan yang digagas oleh Muhammadiyah adalah pandangan yang melahirkan keutamaan yang memayungi kemajemukan suku bangsa, ras, golongan, dan kebudayaan umat manusia di muka bumi.³⁷ Pandangan ini tentunya hanya dan sangat sejalan dalam gagasan Negara Pancasila sebagai *Dar Al-‘Ahdi wa Al-Syahadah*. Dalam artian bahwa dalam negara Pancasila, kemajemukan itu bisa dikelola tanpa adanya diskriminasi golongan. Karena pada substansinya, gagasan Negara Pancasila sebagai *Dar Al-‘Ahdi wa Al-Syahadah* dan Islam Berkemajuan mengandung spirit ketuhanan sekaligus kemanusiaan yang universal, sebagaimana yang tercantum dalam Tanfidz Keputusan Mukhtar Muhammadiyah ke-47 di Makassar tentang gagasan Negara Pancasila sebagai *Dar Al-‘Ahdi wa Al-Syahadah*, disebutkan bahwa Muhammadiyah sebagai kekuatan strategis umat dan bangsa berkomitmen untuk membangun negara Pancasila dengan pandangan Islam yang berkemajuan. Dalam hal ini, Muhammadiyah memiliki keyakinan adanya keselarasan antara semangat Pancasila di Indonesia dengan semangat Piagam Madinah yang menjadi landasan konstitusi pada awal pemerintahan Islam di bawah Nabi Muhammad.³⁸

Haedar Nashir menarik satu kesimpulan terkait pandangan Islam yang berkemajuan dalam perspektif Muhammadiyah sebagai pandangan yang memiliki perbedaan orientasi dengan gerakan-gerakan Islam lainnya yang cenderung ekstrem. Menurut Haedar, Muhammadiyah berbeda dengan pandangan Islam yang serba liberal dan melakukan dekonstruksi atas ajaran-ajaran Islam sehingga melahirkan pandangan yang serba relatif. Hanya saja dalam hal ini Haedar tidak menjelaskan secara terperinci seperti apa yang dimaksud dengan liberal. Di sisi lain menurut Haedar, Muhammadiyah juga berbeda dengan pandangan dan gerakan dengan kelompok Islam yang cenderung radikal dan konservatif atau radikal fundamentalis. Secara eksplisit Haedar menyebut beberapa kelompok seperti Salafi, Wahabi, Tarbiyah, Ikhwanul Muslimin, Taliban, Hizbut Tahrir, Majelis Mujahidin, dan lain-lain. Muhammadiyah juga menurut Haedar berbeda dengan partai-partai politik Islam, termasuk dengan partai dakwah apapun, karena menurutnya, partai-partai tersebut selain memiliki ideologinya sendiri, juga semuanya berjuang di jalur politik praktis.³⁹

Gagasan bernegara dalam konsep Negara Pancasila sebagai *Dar Al-‘Ahdi wa Al-Syahadah* dan Islam Berkemajuan yang menjadi ikhtiar Muhammadiyah dalam menunjukkan komitmennya terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia jelas

³⁶ Haedar Nashir, "Islam Berkemajuan dan Aktualisasi Gerakan Muhammadiyah", dalam *Islam Berkemajuan untuk Peradaban Dunia: Refleksi dan Agenda Muhammadiyah ke Depan*, ed. Alpha Amirrachman, Andar Nubowo, dan Azaki Khoirudin, (Bandung: Mizan, 2015), hal. 12.

³⁷ Haedar Nashir, *Islam Berkemajuan*, hal. 15.

³⁸ Berita Resmi Muhammadiyah, hal. 70.

³⁹ Haedar Nashir, *Memahami Ideologi Muhammadiyah*, (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2014), 57-58.

bukan tanpa tantangan. Sebuah gagasan hanya akan menjadi fosil yang mengendap jika gagasan tersebut tidak disertai dengan peran-peran strategis dari organisasi ini.

Negara Pancasila sebagai Dar Al-‘Ahdi wa As-Syahadah: Respon Muhammadiyah Terhadap Islamisme

Kebangkitan kalangan Islamisme terus menguat dalam beberapa tahun terakhir. Kebangkitan-kebangkitan kelompok Islamis ini bermula di negara-negara Arab dan Timur Tengah, dan perlahan-lahan pengaruh mereka telah menembus ke negara-negara Islam atau mayoritas berpenduduk muslim, termasuk Indonesia. Bahkan pengaruh mereka juga telah menembus ke komunitas muslim di negara-negara sekuler di Eropa seperti Inggris dan Perancis. Menanggapi fenomena tersebut, gerakan Islam berhaluan moderat diharapkan bisa melakukan *counter hegemoni ideology* agar persepsi masyarakat dunia tidak didominasi oleh ide-ide gerakan Islam berwajah konservatif-radikal, sebagaimana banyak kita jumpai di kalangan aktivis islamis tersebut.

Sebagaimana penjelasan di atas, para peneliti telah mencatat sukses besar Indonesia dalam menampilkan wajah Islam moderat-progresif. Gerakan Islam pasca Orde Baru dipuji oleh banyak kalangan karena tetap mempertahankan karakteristik yang moderat dan progresif, sampai kemudian muncul kekuatan Islam konservatif-radikal yang dimotori oleh sejumlah organisasi Islam dengan orientasi ideologi-politik Islamisme. Dalam rentang waktu dua puluh tahun terakhir kebangkitan kelompok konservatif-radikal mendapat liputan luas di banyak media melalui aktivitas mereka menarik perhatian masyarakat, sehingga muncul kesan, kelompok ini merupakan kekuatan Islam dominan di Indonesia. Misalnya Muktamar Khilafah yang diselenggarakan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) di Istora Senayan yang dihadiri ribuan orang. Situasi yang ditandai oleh tafsir Islam oleh kelompok Islamis yang bercorak konservatif-radikal yang mendominasi wacana publik dengan mengalahkan interpretasi Islam dari kalangan Islam moderat ini disebut Marti van Bruinessen sebagai gejala *conservative turn*⁴⁰

Bukan tanpa alasan kemunculan kelompok ini bisa dikatakan “berkah” dari sistem demokrasi yang menjamin hak-hak sipil dan kebebasan politik, serta ruang partisipasi publik yang terbuka luas untuk mengekspresikan aspirasi politik dengan orientasi ideologi yang beraneka ragam. Jelas kelompok Islamis yang bercorak konservatif-radikal ini mendapat keuntungan dari sistem demokrasi tersebut sehingga mereka dapat menunjukkan eksistensinya di tengah-tengah masyarakat Indonesia.

Dalam konteks pergumulan ideologi-politik ini, kekuatan-kekuatan *civil society* seperti Muhammadiyah memiliki peran dalam membuat garis batas yang tegas agar kekuatan Islamisme dengan agenda politiknya tidak menguasai ruang publik, apalagi mendominasi baik wacana maupun praksis politik Islam di Indonesia. Muhammadiyah adalah bagian dari asosiasi masyarakat sipil yang menjadi tiang penyangga struktur dan sistem politik demokrasi modern di Indonesia. Sebagai gerakan yang lahir jauh sebelum kemerdekaan dan bahkan ikut melahirkan negara ini, Muhammadiyah bertanggungjawab terhadap masa depan Indonesia yang berdasarkan

⁴⁰ Lihat Martin van Bruinessen dalam *Conservative Turn: Islam Indonesia dalam Ancaman Fundamentalisme*, (Bandung: Mizan, 2014).

AQLAM: Jorunal of Islam and Plurality

(P-ISSN 2528-0333; E-ISSN: 2528-0341)

Website: <http://journal.iain-manado.ac.id/index.php/AJIP/index>

Vol. 8, No. 1 2023

Pancasila. Peran strategis Muhammadiyah dalam kehidupan bernegara juga diperkuat dalam konsep Negara Pancasila sebagai *Dar Al-'Ahdi wa Al-Syahadah*, di mana kehidupan kebangsaan Muhammadiyah sejak awal berjuan untuk pengintegrasian keislaman dan keindonesiaan. Dalam hasil putusan Muktamar Muhammadiyah ke-47, peran strategis Muhammadiyah dalam menyikapi pelbagai problem kebangsaan dengan spirit Islam yang berkemajuan dan termanifestasikan dalam gagasan kebangsaannya *Negara Pancasila sebagai Dar Al-'Ahdi wa Al-Syahadah*, organisasi ini mengeluarkan pandangannya terkait isu-isu strategis keumatan, kebangsaan, dan kemanusiaan universal.

Kesimpulan

Islamisme telah menjadi tantangan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Lewat ideologi dan aktivitasnya, kelompok ini memiliki orientasi politik yang berbeda dengan *civil society* lainnya di Indonesia, seperti Muhammadiyah. Gagasan Negara Pancasila sebagai Dar al-'Ahdi wa as-Syahadah yang dirumuskan lewat Muktamar Muhammadiyah ke-47 tahun 2015 menegaskan respon Muhammadiyah terhadap ideologi islamisme yang bertujuan untuk mengubah dasar serta ideologi negara Pancasila. Respon Muhammadiyah ini juga menunjukkan peran strategis Muhammadiyah dalam kehidupan bernegara dalam mengintegrasikan nilai keislaman dan keindonesiaan dalam Gagasan Negara Pancasila sebagai Dar al-'Ahdi wa as-Syahadah.

BIBLIOGRAPHY

Assyaukanie, Luthfi, *Islam an the Secular State in Indonesia*, Singapore: ISEAS, 2009.

_____, *Ideologi Islam dan Utopia: Tiga Model Negara Demokrasi di Indonesia*, Jakarta: Paramadina, 2011.

Baehaqi, Dikdik dan Syifa Siti Aulia, "Studi Tentang Negara Pancasila sebagai Darul Ahdi wa Syahadah Untuk Penguatan Materi Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di Universitas Ahmad Dahlan, *Jurnal Civics*, vol. 14, no. 2, Oktober 2017.

Bruinessen, Martin van, *Conservative Turn: Islam Indonesia dalam Ancaman Fundamentalisme*, Bandung: Mizan.

Djamil, Fathurrahman, *Metode Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah*, Jakarta: Logos, 1995.

Hasan, Noorhaidi, *Islam Politik Di Dunia Kontemporer: Konsep, Genealogi, Dan Teori*, Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2012.

Maarif, Ahmad Syafii, *Islam Dalam Bingkai Keindonesiaan dan Kemanusiaan: Sebuah Refleksi Sejarah*, Bandung: Mizan, 2009

Mudzakkir, Amin, "Islamisme di Indonesia", *TITIK-TEMU: Jurnal Dialog Peradaban*, vol. 8, no. 2, Januari-Juni 2016.

Nashir, Haedar, *Memahami Ideologi Muhammadiyah*, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2014.

AQLAM: Jorunal of Islam and Plurality

(P-ISSN 2528-0333; E-ISSN: 2528-0341)

Website: <http://journal.iain-manado.ac.id/index.php/AJIP/index>

Vol. 8, No. 1 2023

- _____, “Islam Berkemajuan dan Aktualisasi Gerakan Muhammadiyah”, dalam *Islam Berkemajuan untuk Peradaban Dunia: Refleksi dan Agenda Muhammadiyah ke Depan*, ed. Alpha Amirrachman, Andar Nubowo, dan Azaki Khoirudin, Bandung: Mizan, 2015.
- Qomar, Mujamil, *Fajar Baru Islam Indonesia? Kajian Komprehensif atas Sejarah dan Dinamika Intelektual Islam Nusantara*, Bandung: Mizan, 2012.
- Rahman, Rahman, *Islam dan Modernitas: Tentang Transformasi Intelektual*, terj. Ahsin Mohammad, Bandung: Pustaka, 2005.
- Roy, Oliver, *The Failure of Political Islam*, London: I.B. Tauris Publishers, 1994.
- Syamsuddin, Din, “NKRI: Negara Perjanjian dan Kesaksian”, dalam *Islam Nusantara: Dari Ushul Fiqh Hingga Paham Kebangsaan*, ed. Akhmad Sahal dan Munawir Aziz, Bandung: Mizan Pustaka, 2015.
- Tibi, Bassam, *Islam dan Islamisme*, terj. Alfathri Adlin, Bandung: Mizan, 2016.
- Wahid, Abdurrahman, “Musuh Dalam Selimut” dalam Pengantar Editor, *Ilusi Negara Islam*, Jakarta: The Wahid Institute, 2009.
- Wahid, Din, “Muhammadiyah Di Tengah Arus Gerakan Islam Transnasional” dalam *Islam Berkemajuan Untuk Peradaban Dunia: Refleksi dan Agenda Muhammadiyah ke Depan*, ed. Alpha Amirrachman, Andar Nubowo, Azaki Khoiruddin, Bandung: Mizan, 2015.
- Zada, Khamami, “Politik Islam Radikal: Survey Wacana dan Gerakan Islam di Indonesia, dalam Islam, Radikalisme, dan Demokratisasi, *Jurnal Demokrasi dan HAM*, vol. 3, no. 1, Januari-April 2003.
- Zuhri, Saefudin, *Deradikalisasi Terorisme: Menimbang Perlawanan Muhammadiyah dan Loyalitas Nahdlatul Ulama*, Jakarta: Daulat Press, 2017.
- Berita Resmi Muhammadiyah no. 1 2015-2020, *Tanfidz Keputusan Mukhtamar Muhammadiyah Ke-47 Makassar*, Yogyakarta: Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 2015.